

SKRIPSI

ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

**ACHMAD SAIFULLAH
A011191076**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diusulkan Oleh:

**ACHMAD SAIFULLAH
A011191076**



Kepada:

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

ACHMAD SAIFULLAH
A011191076

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 05 Maret 2024

Pembimbing I



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MSi., CPF.
NIP. 19660811 199103 2 001

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti SE., M.Si
NIP. 19770913 200212 2002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

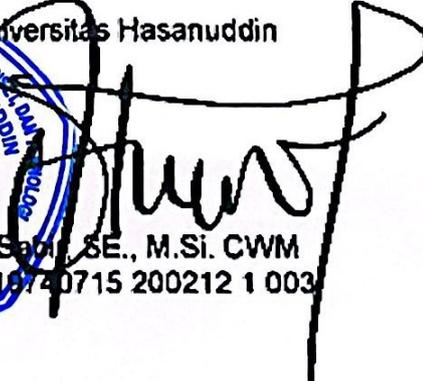
ACHMAD SAIFULLAH
A011191076

Telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal 5 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MSi., CPF	Ketua	1. 
2	Dr. Retno Fitrianti SE., M.Si	Sekretaris	2. 
3	Dr. Madris, DPS., M.Si., CWM.	Anggota	3. 
4	Dr. Fatmawali, SE., MSi., CWM.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabiq, SE., M.Si. CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ACHMAD SAIFULLAH

Nomor Pokok : A011191076

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Variabel Makroekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Maret 2024

Yang Menyatakan



ACHMAD SAIFULLAH

A011191076

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul “Analisis Variabel Makroekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal yang bernilai pahala di sisi-Nya.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih terdalam dan setinggi-tingginya kepada:

1. Penulis menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa, teriring doa dan kasih sayang yang tiada henti atas segala cinta dan sayang yang tiada berujung, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai dengan doa-doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk anaknya.
2. Bapak Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
3. Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MSi., CPF. selaku penasihat akademik penulis juga pembimbing utama dalam penyusunan skripsi. Terima kasih memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Retno Fitrianti SE., M.Si. selaku pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi. Terimakasih untuk setiap kritik, saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Dr. Madris, MA., CWM. dan Dr. Fatmawati, M.Si., CWM. selaku penguji yang telah memberikan kritik serta saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen FEB-UH, khususnya Program Ilmu Ekonomi, yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada penulis selama menempuh pendidikan. Juga, kepada para staff pegawai FEB-UH yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.

7. Untuk teman seperjuangan penulis, Ilmu Ekonomi Angkatan 2019 (Formiga), dan Panter Berkemah. Terima kasih atas segala bantuan, saran, motivasi, nasihat yang diberikan kepada penulis mulai dari pertama menginjakkan kaki di kampus bersama-sama hingga sampai saat ini. Suka dan duka yang tercipta selama ini yang menjadi pengalaman berharga bagi penulis karena kalian adalah sahabat dan saudara sekaligus guru yang terbaik yang diberikan-Nya. Terima kasih banyak atas waktu, saran, serta kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Keluarga Mahasiswa Himajie FEB-UH dan teman-teman Media Ekonomi, terimakasih atas segala pengalaman dan pelajaran yang telah diberikan selama menggeluti organisasi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terimakasih.

Demikianlah, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi semoga Tuhan YME memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, aamiin...

Makassar, 7 Maret 2024



Achmad Saifullah

ABSTRAK

ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Achmad Saifullah
Sri Undai Nurbayani
Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel makroekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data panel dengan menggunakan program Eviews 12.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, upah minimum berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Inflasi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, UMR, Inflasi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRAC

ANALYSIS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON THE WELFARE OF URBAN COMMUNITIES IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Achmad Saifullah
Sri Undai Nurbayani
Retno Fitrianti

This study aims to analyze macroeconomic variables on the welfare of urban communities in South Sulawesi. This research employs a quantitative approach. The data used are secondary data collected using the literature review method. The analytical method used is panel data analysis using the Eviews 12.0 program. The results of this study indicate that the minimum wage has a positive effect on community welfare, inflation does not affect community welfare, investment has a positive effect on community welfare, and government expenditure has a positive effect on community welfare.

Keywords: Community Welfare, Minimum Wage, Inflation, Investment, Government Expenditure

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LAMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teoritas.....	12
2.1.1 Teori <i>Welfare Economics</i>	12
2.1.2 Teori Upah.....	14
2.1.3 Upah Minimum.....	16
2.1.4 Inflasi.....	17
2.1.5 Investasi.....	18
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah.....	19
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	20
2.3 Studi Empiris.....	22
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian.....	24

2.5	Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	27
3.2	Jenis dan Sumber Data	27
3.3	Metode Pengumpulan Data	27
3.4	Model Analisis Data.....	28
3.5	Uji Kesesuaian Model	28
3.6	Estimasi Regresi Data Panel	30
3.7	Uji Hipotesis.....	33
3.8	Uji Asumsi Klasik	34
3.9	Definisi Operasional	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian	38
4.1.1	Perkembangan Konsumsi Perkapita.....	38
4.1.2	Perkembangan Upah Minimum	40
4.1.3	Perkembangan Variabel Inflasi	41
4.1.4	Perkembangan Variabel Investasi.....	43
4.1.5	Perkembangan Variabel Pengeluaran Pemerintah	44
4.2	Pengujian Model Regresi Data Panel	45
4.3	Hasil Estimasi.....	47
4.4	Uji Hipotesis.....	52
4.5	Uji Asumsi Klasik	53
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
4.5.1	Pengaruh Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Masyarakat perkotaan di Sulawesi Selatan.....	55
4.5.2	Pengaruh Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat perkotaan di Sulawesi Selatan.....	57
4.5.3	Pengaruh Investasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat perkotaan di Sulawesi Selatan.....	58
4.5.4	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat perkotaan di Sulawesi Selatan	59
BAB V PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1	Konsumsi Per Kapita Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2013-2022 (juta rupiah)..... 2
1.2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo Tahun 2013-2022 3
1.3	Upah Minimum Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2018-2022 (Rupiah) 6
1.4	Tingkat Inflasi Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2013-2022 7
1.5	Jumlah Investasi PMTB (Penetapan Modal Tetap Bruto) Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo Tahun 2019-2022 (Milyar Rupiah) 8
2.1	Kerangka Konseptual..... 23
4.1	Konsumsi Perkapita Masyarakat Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo (Juta Rupiah) 39
4.2	Upah Minimum Kota Makassar, Parepare, dan Palopo Tahun 2010-2022 (Rupiah) 41
4.3	Tingkat Inflasi Wilayah Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan 42
4.4	Jumlah Investasi Wilayah Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan (Milyar Rupiah) 43
4.5	Jumlah Pengeluaran Pemerintah Wilayah Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan (Milyar Rupiah) 45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Hasil Uji Chow	46
4.2 Hasil Uji Housman	47
4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	48
4.4 Hasil Uji Normalitas dengan Jarque bera	54
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	54
4.6 Uji Heteroskedastisitas	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

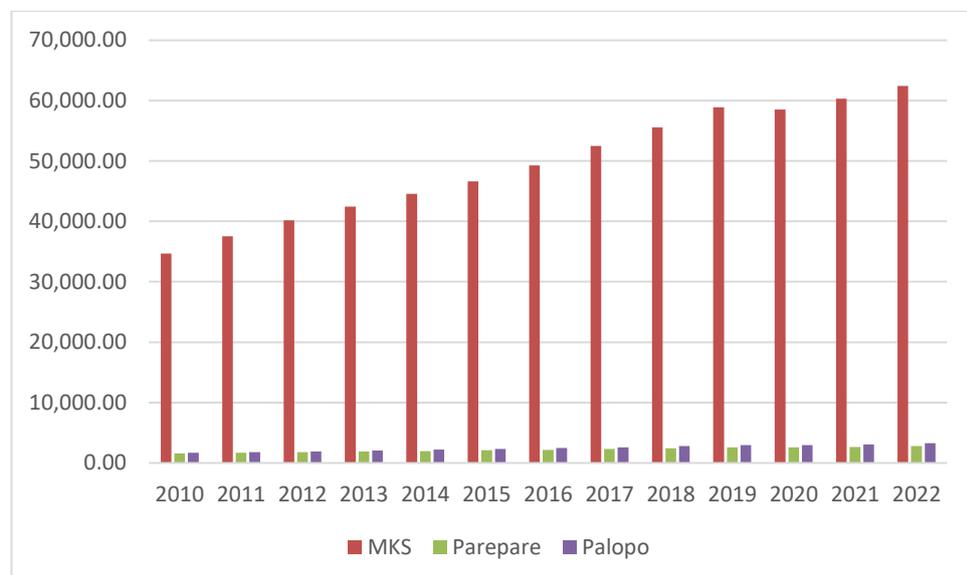
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang harus diwujudkan melalui proses pembangunan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pencapaian pemerataan dan mensejahterakan masyarakat (Muller & Steiner, 2013). Pemahaman akan tujuan pembangunan merupakan kunci dalam menyusun langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengarahkan perkembangan suatu masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik.

Kesejahteraan ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi suatu negara atau wilayah. Melalui kontribusi ekonomi kita dapat memahami sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat terbentuk dan berkembang (Bleys & Whitby, 2015). Saat mengevaluasi ukuran kesejahteraan, perhatian utama tertuju pada analisis biaya dan manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di dalamnya. Biaya dan manfaat ini mencakup berbagai aspek, seperti pengeluaran konsumen, investasi, dan dampak lingkungan. Manfaat dari aktivitas ekonomi ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur, tetapi juga kualitas hidup yang dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil dari konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan ekonomi memberikan landasan penting untuk merinci aspek-aspek penting dalam memahami hubungan antara aktivitas ekonomi,

kontribusi terhadap kesejahteraan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari pendistribusikan secara merata hasil pembangunan ekonomi kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu menyusun kebijakan baik fiskal maupun moneter, sehingga masyarakat di semua tingkat pendapatan mendapat manfaat dari proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi di suatu negara tidak hanya harus meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), namun juga memastikan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, akan diikuti dengan pendapatan masyarakat yang semakin tinggi sehingga jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin berkurang. Agar pembangunan ekonomi dapat berdampak terhadap kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan perbaikan distribusi pendapatan (Mangantar, 2018).

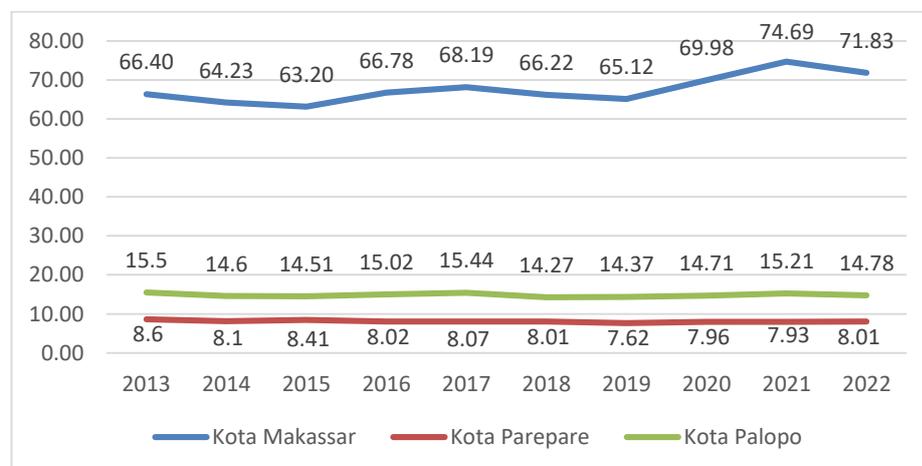


Sumber: BPS Kota Makassar; BPS Kota Parepare; BPS Kota Palopo

Gambar 1.1 Konsumsi Perkapita (juta rupiah) Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2010-2022

Gambar 1.1 di atas menunjukkan jumlah Konsumsi per kapita Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo selama periode 2010-2022. Jumlah konsumsi per kapita dari ketiga kota tersebut terus mengalami peningkatan selama periode pengamatan. Hal ini mencerminkan peningkatan daya beli serta pendapatan masyarakat yang terus meningkat yang pada gilirannya dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Kesejahteraan atau pemenuhan kebutuhan konsumsi merupakan hal vital dan menjadi tujuan terpenting yang ingin dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Munawar Ismail (dalam Suparta, 2010), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Sebagian ahli berpendapat bahwa pemerataan pendapatan tidak dapat dicapai seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa keduanya dapat dicapai pada waktu yang bersamaan. Thee Kian Wie (dalam Suparta, 2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan tidak selalu mempunyai hubungan yang negatif, padahal di sebagian besar negara berkembang, pertumbuhan ekonomi selalu diiringi dengan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.



Sumber: BPS Kota Makassar; BPS Kota Parepare; BPS Kota Palopo

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo Tahun 2013-2022

Berbeda dengan jumlah pendapatan perkapita yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah penduduk miskin Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo yang di tunjukkan pada gambar 1.2 di atas menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Hal tersebut mengartikan bahwa, tujuan dari penurunan kemiskinan di Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo masih belum konsisten terbukti dari jumlah penduduk miskin yang belum mengalami penurunan secara signifikan.

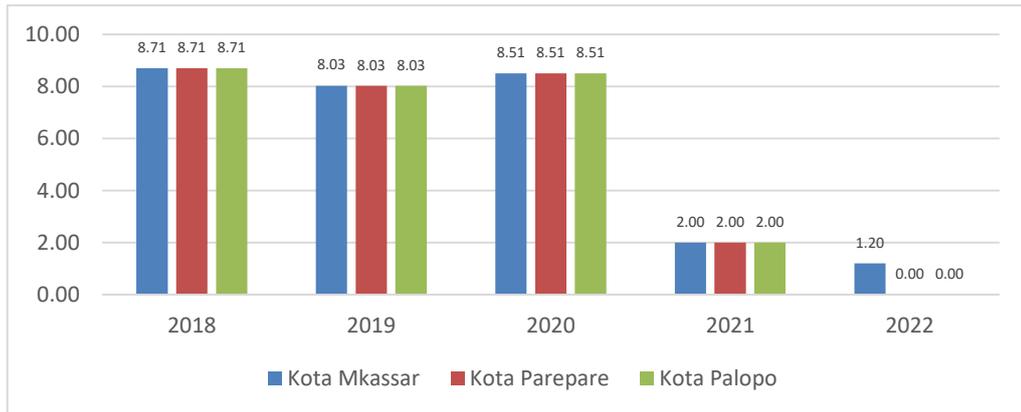
Kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh rumah tangga (Aleksandra & Zbigniew, 2014). Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari seberapa besar penghasilan yang mereka dapatkan. Upah bagi masyarakat merupakan sumber atas penghasilan. Apabila terjadi kenaikan atas jumlah penghasilan, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Sebaliknya, apabila upah mengalami penurunan maka berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan (Jyaningtyas & Bintaro, 2023).

Penerapan upah minimum diperlukan untuk memastikan pekerja setidaknya memiliki kesejahteraan minimal, stabilitas pendapatan, dan menyediakan standar hidup yang layak, serta mengurangi ketimpangan dan mempromosikan inklusivitas sosial. Upah minimum merupakan pendapatan berupa uang untuk memperluas pilihan ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun demikian jenis kebijakan ini belum tentu akan membawa kesejahteraan masyarakat. Bahkan, banyak kritikan dari berbagai pihak bahwa upah minimum justru kontraproduktif karena mengganggu pasar tenaga kerja (Sodsriwiboon & Srour, 2019).

Upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja PP No.78/2015 tentang kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi pekerja atau buruh (BPK RI). Upah minimum kota merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Peningkatan upah minimum kota akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada *Human Development Index*. Upah minimum bertujuan menjaga agar upah bagi pekerja pemula dan tidak trampil tidak jatuh terlalu rendah. Upah minimum yang terlalu rendah juga tidak akan membahayakan pekerja (Brown et al., 2014). Selain itu, upah minimum juga dapat mengkoordinasi pembangunan di ekuilibrium upah yang tinggi. Sebaliknya, sisi negatif dari segi ekonomi memperlambat laju *employment*, inflasi (*cost push inflation*), kesenjangan antar sektor, dari segi perusahaan dapat menciptakan ketidak-adilan, mendorong perusahaan untuk menghemat penggunaan tenaga kerja bukan inti dan tidak trampil, dan dalam jangka menengah mendorong melakukan substitusi (Magruder, 2013)

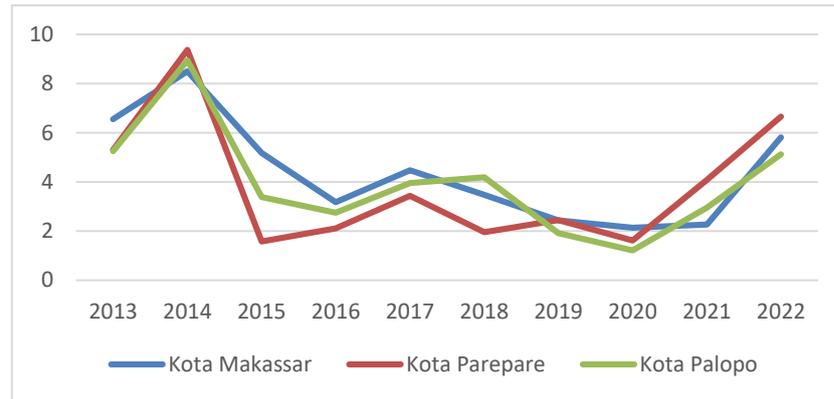
Upah minimum juga menjadi salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama pada sektor industri yang membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Semakin tinggi upah minimum kota suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010). Berikut adalah data terkait upah minimum Kota Makassar dari tahun 2013 sampai 2022, yaitu sebagai berikut.



Sumber: Pemkot. Kota Makassar; Pemkot. Parepare; dan Pemkot. Palopo

Gambar 1.3 Persentase Kenaikan Upah Minimum Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo pada tahun 2018-2022 memiliki besaran yang cenderung sama terutama Kota Parepare dan Kota Palopo. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan untuk ke tiga kota tersebut. Namun, pada tahun 2022 untuk Parepare dan Kota Palopo tidak mengalami peningkatan upah minimum. Upah minimum yang lebih tinggi dapat memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan sehingga, meningkatkan kemampuan penanggulangan terhadap kemiskinan (Sulistiawati, 2012). Namun, kenaikan upah minimum juga dapat berdampak negatif, seperti hilangnya pekerjaan dalam kasus individu yang menerima tingkat pendapatan atau kenaikan harga yang meluas. Faktanya, jika harga-harga secara umum (inflasi) dan upah minimum keduanya naik dengan proporsi yang sama, kenaikan upah tidak akan menghasilkan keuntungan yang nyata (Raymundo, 2017).



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

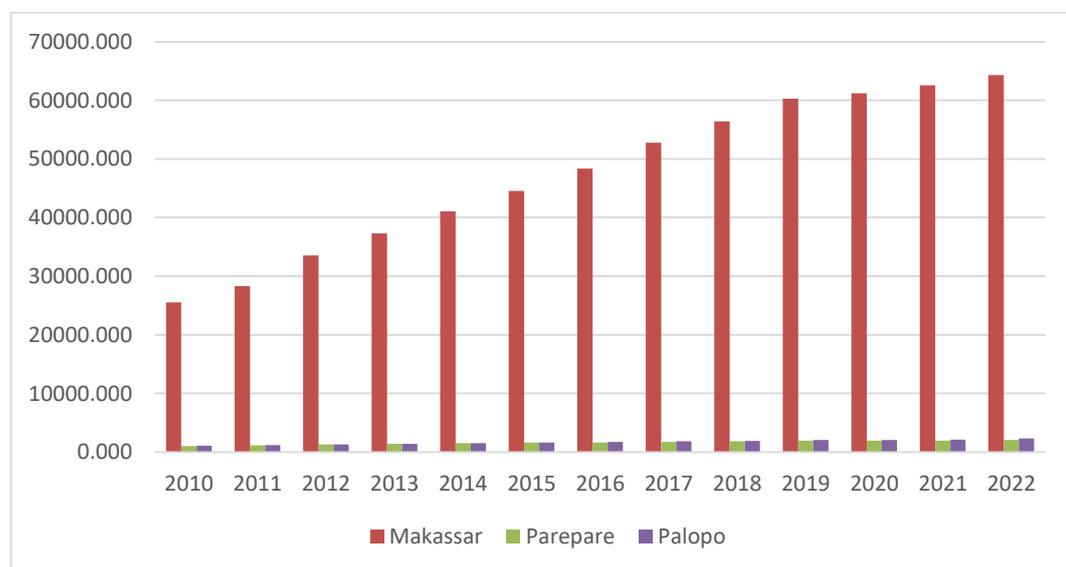
Gambar 1.4 Tingkat Inflasi Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2013-2022

Selain pendapatan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan adalah tingkat inflasi. Inflasi menurunkan pendapatan riil khususnya pada kelompok pendapatan tetap. Selama inflasi, kelompok pendapatan tetap merugi karena harga beberapa barang dan jasa naik lebih cepat dibandingkan upah nominal. Kelas miskin menderita karena upah mereka tetap namun harga komoditas terus meningkat (Oye, 2012). Inflasi merupakan kenaikan umum pada harga barang dan jasa dalam secara jangka panjang. Dalam berbagai negara, tingkat inflasi yang berfluktuasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk pendapatan individu dan rumah tangga. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dampak inflasi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi itu sendiri, stabilitas ekonomi negara, dan distribusi pendapatan yang ada.

Gambar 1.5 menunjukkan tingkat inflasi Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo tahun 2013-2022. Selama periode pengamatan, inflasi Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo mengalami fluktuasi. Pengendalian terhadap inflasi merupakan tujuan kebijakan moneter untuk mempertahankan daya beli masyarakat namun, penurunan harga juga tidak diinginkan. Ketika harga

turun, konsumen menunda pembelian sebisa mungkin, mengantisipasi harga yang lebih rendah di masa depan. Bagi perekonomian, hal ini berarti berkurangnya aktivitas perekonomian, berkurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh produsen, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

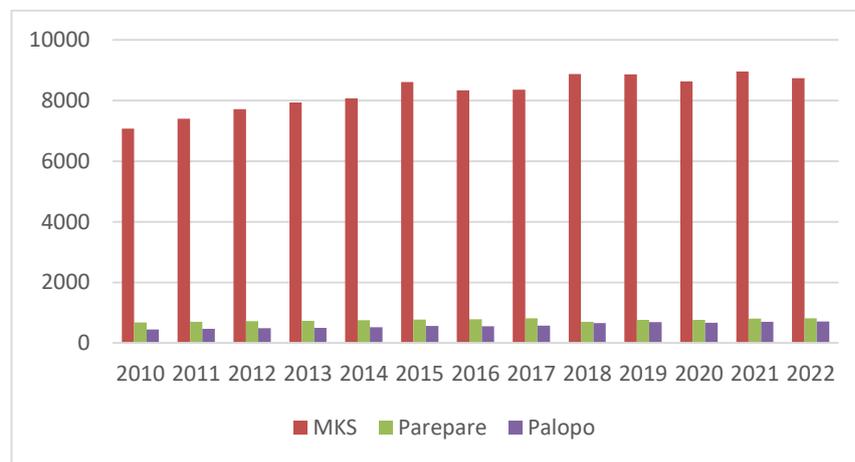
Untuk mendorong pendapatan per kapita diperlukan akumulasi modal melalui investasi. Tingkat investasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Investasi modal akan menunjang penambahan industri sehingga akan meningkatkan output yang membutuhkan tambahan tenaga kerja dalam proses produksinya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Masniadi, 2012). Tenaga kerja yang berkualitas sangat menunjang peningkatan produksi perusahaan sehingga output menjadi lebih besar atau lebih produktif dan kesejahteraan tenaga kerja pun meningkat .



Sumber: BPS Kota Makassar; BPS Kota Parepare; BPS Kota Palopo

Gambar 1.5 Jumlah Investasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo Tahun 2010-2022

Gambar 1.5 di atas menunjukkan tren peningkatan investasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) di Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo tahun 2019-2022 investasi di Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo mengalami terus peningkatan sejak tahun 2019-2022. Besarnya tingkat investasi tersebut, dapat menciptakan produktifitas pasar yang lebih tinggi sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula. Namun, perlu diperhatikan bahwa dampak dari investasi tergantung seberapa besar efisiensi dari investasi tersebut (Miyamoto, dkk. 2020). sehingga optimasilisasi penggunaan modal sangat diperlukan.



Sumber: BPS Kota Makassar; BPS Kota Parepare; BPS Kota Palopo

Gambar 1.6 Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo Tahun 2010-2022

Penciptaan Kesejahteraan tidak terlepas dari peran fiskal atau kebijakan pemerintah dalam meregulasi jalannya perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal, yang melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, memainkan peran krusial dalam membentuk kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Melalui alat-alat fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja publik, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, atau pengentasan kemiskinan. Tabel 6.1 memperlihatkan pengeluaran riil pemerintah

wilayah perkotaan di Sulawesi Selatan. Walaupun kecenderungan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih mengalami fluktuatif. Pengeluaran pemerintah seharusnya menjadi faktor stimulus dalam pembangunan ekonomi melalui proyek infrastruktur bahkan pengeluaran langsung subsidi atau program lainnya.

Bedasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Pengaruh Upah minimum Kota (UMK), Inflasi, dan Investasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh upah minimum, inflasi, dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator konsumsi perkapita. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai bahan perbandingan dan tambahan referensi untuk melengkapi referensi yang sudah ada bagi penulis atau peneliti selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis.

2.1.1 Teori *Welfare Economics*

Kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari dua konsep yang terdiri dari kesejahteraan yang mencerminkan keadaan yang aman, sejahtera, makmur, dan dilindungi, serta masyarakat yang mengacu pada sekelompok individu yang hidup dalam suatu budaya tertentu. Kedua konsep ini saling mempengaruhi dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Selain itu, menurut Mangantar (2018) mengartikan kesejahteraan masyarakat sebagai kemampuan dasar manusia dalam peningkatan derajat kesehatan berupa umur panjang dan hidup sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk dapat berperan serta dalam kegiatan ekonomi produktif dan memperoleh pendapatan yang cukup serta memiliki daya beli.

Kesejahteraan masyarakat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2019 merujuk pada keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya (BPK RI). Dalam undang-undang ini, terlihat bahwa tingkat kesejahteraan dapat diukur melalui kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan material terkait dengan pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Di sisi lain, kebutuhan spiritual terkait dengan pendidikan, serta rasa aman dan ketentraman

dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya dari pemenuhan tersebut untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup,

mengembalikan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian, serta meningkatkan jaminan sosial masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum yang bersih. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan. Melalui pemenuhan kebutuhan ini, kualitas hidup individu tersebut dapat meningkat, dan mereka dapat mencapai status sosial yang setara dengan masyarakat yang sejahtera lainnya. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki rumah yang memadai dan sesuai standar keamanan serta kenyamanan. Selain itu, penting juga untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, agar masyarakat dapat hidup dengan cukup dan terhindar dari masalah kelaparan dan kekurangan gizi (Pambudy & Syairozi, 2019). Selain itu, akses yang terjangkau dan berkualitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga merupakan faktor penting dalam kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang terjangkau memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas memastikan akses ke perawatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik masyarakat. Dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini akan menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat hidup dengan layak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Pambudy & Syairozi, 2019).

Pengeluran konsumsi perkapita digunakan untuk mengukur standar hidup masyarakat. Ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga

menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan. Kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran konsumsi perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah (Yunita:2012).

Pengeluaran konsumsi perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pembangunan manusia akan menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat bertambah terus-menerus dalam jangka panjang, sehingga pengeluaran perkapita juga mengalami peningkatan.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pengeluaran konsumsi perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu (BPS, 2020). Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

2.1.2 Teori Upah

Teori Upah pertama kali dikenal sebagai Hukum Upah Besi atau hukum Upah Brazen (Chauhan, 2020). Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Physiocrats, kemudian dikembangkan oleh seorang ekonom Jerman Lasalle.

Bapak Ekonomi Adam Smith juga menyebutkan teori tersebut dalam bukunya "*The Wealth of Nations*", di mana ia menyatakan bahwa upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harus cukup agar mereka dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Menurut David Ricardo (1772-1823) "para buruh dibayar untuk memungkinkan mereka bekerja bertahan hidup dan melestarikan ras tanpa bertambah atau berkurang". Pembayaran ini juga disebut sebagai upah subsisten. Jika pekerja dibayar kurang dari upah subsisten, jumlah pekerja akan berkurang akibat kelaparan, malnutrisi, penyakit dll. Hukum permintaan dan penawaran kemudian akan membawa tingkat upah kembali naik ke tingkat subsisten. Sebaliknya ketika tenaga kerja dibayar lebih dari upah subsisten mereka mungkin akan menikmati kesenangan dan akibatnya jumlah mereka akan meningkat, dan akibatnya menghasilkan tingkat upah yang rendah.

Wage Fund Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Adam Smith yang kemudian diuraikan oleh JS Mill (1869). Teori ini mengatakan bahwa upah terutama bergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja atau proporsi antara populasi dan modal yang tersedia (John, 1995). Besaran Dana Gaji bersifat tetap dan tidak dapat dinaikkan tanpa mengurangi jumlah pekerja begitu pun sebaliknya. Dana atas upah yang menentukan permintaan akan tenaga kerja. Namun, pasokan tenaga kerja tidak dapat diubah pada waktu tertentu. Tetapi jika penawaran tenaga kerja meningkat seiring dengan peningkatan populasi, upah rata-rata akan turun. Oleh karena itu berdasarkan teori ini, untuk meningkatkan upah rata-rata, dana atas upah harus diperbesar dan jumlah pekerja yang meminta pekerjaan harus dikurangi.

Selanjutnya teori Produktifitas Marginal yang pertama kali ungkapkan oleh Von Thunen (1826) dan kemudian dikembangkan oleh JB Clark, Wicksteed dan Walrus (Chauhan, 2020). Teori ini menyatakan bahwa upah seorang pekerja

tergantung pada produktivitas pekerja. Ini menyatakan bahwa ketika pemberi kerja terus mempekerjakan tenaga kerja, menurut Hukum Utilitas Marginal yang Semakin Berkurang, produk marjinal akan turun dan dengan demikian tenaga kerja dipekerjakan hingga tingkat di mana upah sama dengan tingkat marjinal. Secara jelas teori ini menetapkan bahwa pemberi kerja hanya dapat mempekerjakan pekerja sampai batas di mana dia mampu membayar upah untuk produktivitas. Dengan kata lain, teori ini mengasumsikan bahwa upah tergantung pada permintaan, dan penawaran, tenaga kerja. Akibatnya, pekerja dibayar sesuai dengan nilai ekonomi mereka. Akibatnya, pemberi kerja memiliki bagian keuntungan yang lebih besar karena tidak harus membayar pekerja non-marjinal.

2.1.3 Upah Minimum

Menurut *Internasional Labour Organization* (ILO) upah minimum merupakan jumlah minimum upah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada penerima upah untuk pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu, yang tidak dapat dikurangi dengan kesepakatan bersama atau kontrak individu. Upah minimum dapat ditetapkan oleh undang-undang, keputusan dari otoritas yang berwenang, atau juga dapat ditetapkan dengan memberikan kekuatan hukum pada ketentuan kesepakatan bersama (ILO, 2014).

Di Indonesia penetapan upah minimum di atur secara resmi oleh pemerintah. Implementasi pembayaran upah minimum sepanjang tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Menurut aturan tersebut, Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu namun memiliki kualifikasi

tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum. Kualifikasi tersebut, meliputi pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja. Sementara itu, Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja tahun tahun atau lebih penentuan upah didasarkan pada struktur dan skala upah yang telah ditetapkan.

2.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan adanya kecenderungan naiknya harga barang-barang dan jasa (Martono & Harjito, 2008). Menurut Mankiw (2000) bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang yang terus menerus. Selain itu, menurut Rahardja (2014) Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum maka untuk mengukur perubahan laju inflasi (inflation rate) dari waktu ke waktu pada umumnya digunakan suatu angka indeks yang disebut Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan digunakan untuk menghitung besarnya angka laju inflasi. Laju inflasi yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat adalah laju inflasi untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi masyarakat. Angka indeks tersebut dihitung secara periodik dan pada umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan dan tahunan (Badan Pusat Statistik).

Selain dihitung berdasarkan IHK, inflasi dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), yaitu untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa kebutuhan hidup masyarakat. Indeks Harga Produsen (IHP) untuk mengukur perubahan harga bagi produsen. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) untuk

mengukur perubahan harga barang dan jasa perdagangan. Serta dapat dihitung dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

2.1.5 Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang menambah stok modal untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa atau pendapatan di masa yang akan datang. Stok modal yang dimaksud adalah pabrik, mesin, kantor, dan produk produk tahan lama yang digunakan untuk proses produksi (Dornbusch & Fisher, 2004). Investasi juga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai suatu aset di masa depan. Investasi juga mencakup uang yang diinvestasikan dalam suatu usaha bisnis baru atau untuk memperluas bisnis yang sudah ada atau pembelian bunga atau saham dalam suatu bisnis atau investasi suatu aset dalam suatu bisnis.

Investasi memainkan dua peranan dalam ekonomi makro. Pertama, karena ukurannya yang besar dan komponen pengeluaran yang tidak stabil, seringkali investasi menyebabkan perubahan permintaan agregat dan mempengaruhi siklus bisnis. Selain itu, investasi mengarah pada modal akumulasi. Menambah stok bangunan dan peralatan meningkatkan output potensial Negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian investasi memainkan peran ganda, mempengaruhi output jangka pendek melalui dampaknya terhadap permintaan agregat dan mempengaruhi pertumbuhan output jangka panjang melalui dampak pembentukan modal pada output potensial dan penawaran agregat (Samoelson & Nordhaus, 2010:591).

Tindakan investasi diharapkan akan memberi keuntungan yaitu, pendapatan lebih besar dari pada biaya investasi yang dikeluarkan. Dalam melakukan investasi terdapat ketidakpastian akan masa depan karena terdapat

suatu risiko. Oleh sebab itu, penilaian alternatif investasi yang baik yaitu dengan memilih investasi dengan tingkat pengembalian yang tertinggi dari berbagai pilihan investasi pada risiko yang sama atau memilih investasi yang mempunyai tingkat pengembalian yang sama pada risiko yang terkecil.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Samoelson, 2012).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk

aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Todaro, 2015).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Upah minimum dan Kesejahteraan

Kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi, dapat menurunkan lapangan pekerjaan yang tersedia (Elwell, 2014). Fenomena ini akan memberatkan lapangan pekerjaan dengan lebih selektif dan berhati-hati dalam menyeleksi pekerja, yang berakibat pada pengangguran. Sedangkan menurut Raymundo, (2017) penerapan upah minimum dapat pula meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat sehingga, dapat meningkatkan kesempatan dan kesejahteraan.

Upah minimum juga merupakan sumber perdebatan dalam merumuskan kebijakan, Kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2000:158). Selain dari sisi pendapatan, ketika pekerja menerima upah yang lebih tinggi, mereka cenderung memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Ini dapat meningkatkan permintaan konsumen, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

2.2.2 Hubungan Antara Inflasi dan Kesejahteraan

Pengaruh inflasi terhadap tingkat kesejahteraan dapat bervariasi, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan daya beli uang (Susanto, 2014). Artinya, uang yang sama memiliki daya beli yang lebih rendah karena harga barang dan jasa naik. Hal ini dapat mengurangi pendapatan riil atau pendapatan sebenarnya yang dapat dibeli dengan uang yang sama, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi.

Inflasi yang tinggi seringkali menciptakan ketidakpastian ekonomi (Fadilla & Purnamasari, 2021). Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada pendapatan per kapita. Selain itu, tingkat inflasi yang moderat dapat mendorong peningkatan upah karena pekerja biasanya akan menuntut kompensasi yang lebih tinggi untuk mengimbangi penurunan daya beli mereka. Namun, jika inflasi terlalu tinggi atau tidak stabil, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian, yang dapat menghambat pertumbuhan upah. Akibatnya, dampak inflasi terhadap tingkat kesejahteraan akan bergantung pada sejauh mana upah meningkat untuk mengimbangi inflasi (Nofrita, 2022).

2.2.3 Hubungan Antara Investasi dan Kesejahteraan

Investasi sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan produksi, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja (Sukirno, 2004). Ketika lebih banyak pekerjaan tersedia, tingkat pengangguran dapat menurun, dan pendapatan tingkat kesejahteraan dapat meningkat pula karena lebih banyak individu mendapatkan penghasilan.

Investasi juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru (Miyamoto, 2023). Ketika pihak swasta atau pemerintah menginvestasikan dana untuk memperluas atau memodernisasi operasi mereka, mereka sering kali membutuhkan tenaga kerja tambahan. Ini berarti investasi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan, yang kemudian ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dan Kesejahteraan

Hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi dan

kualitas hidup warga negara. Saat pemerintah menginvestasikan dana dalam bidang tertentu, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas di sektor itu saja tetapi juga membuka peluang pekerjaan yang lebih baik bagi warga negara (Pratiwi, 2019). Misalnya program kesehatan yang didanai oleh pemerintah dapat meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, membantu mengurangi beban biaya pengobatan, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum, hal ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dan peluang ekonomi. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah yang cerdas dan tepat sasaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warga negara.

2.3 Studi Empiris

Pramuji & Sugiarto (2020) meneliti tentang determinan Kesejahteraan Masyarakat Asia dari Sisi Kualitas Institusi dan Indikator Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi pengeluaran pemerintah, indeks persepsi korupsi, ekspor, Foreign Direct Investment (FDI) inflow, dan jumlah tenaga kerja terhadap PDB per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi di Asia tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efisiensi pengeluaran pemerintah, indeks persepsi korupsi, ekspor, dan jumlah angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita, sementara FDI inflow tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita.

Sunarsih dkk. (2019) meneliti tentang Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Eks-Karesidenan Besuki Jawa Timur-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan mengkaji pengaruh upah minimum terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat di eks Karesidenan Besuki Jawa Timur Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yaitu gabungan data time series tahun 2005-2015 dan cross section 4 Kecamatan di Eks-Karesidenan Besuki Jawa Timur Indonesia (Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Karesidenan Eks Besuki Jawa Timur Indonesia.

Sulistiawati (2012) meneliti tentang Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial di provinsi di Indonesia pada periode 2006-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan produktivitas rendah dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Kakwani & Son (2015) meneliti tentang ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan ketimpangan dalam berbagai dimensi kesejahteraan di berbagai munisipalitas di Brasil dan mengukur dampak ketimpangan pendapatan pada kesejahteraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan menghambat kesejahteraan, kecuali untuk indikator yang erat kaitannya dengan pendidikan dan pengembangan modal manusia. Temuan lain menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berbeda di berbagai dimensi kesejahteraan, mengurangi ketimpangan pada umumnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Virginanda R. Rindang (2015) meneliti tentang Pengaruh Upah Minimum Kota Terhadap Jumlah Tenaga Kerja, Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Tenaga Kerja, Kesejahteraan tenaga dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis Canonical Correlation atau Korelasi Kanonikal. Semua data untuk analisis Korelasi Kanonikal bertipe metrik, yakni data interval atau data rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya satu variabel dependen yang tidak berpengaruh dengan variabel independen yaitu variabel jumlah tenaga kerja, dan ada dua variabel dependen yang berpengaruh terhadap variabel independen yaitu variabel kesejahteraan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

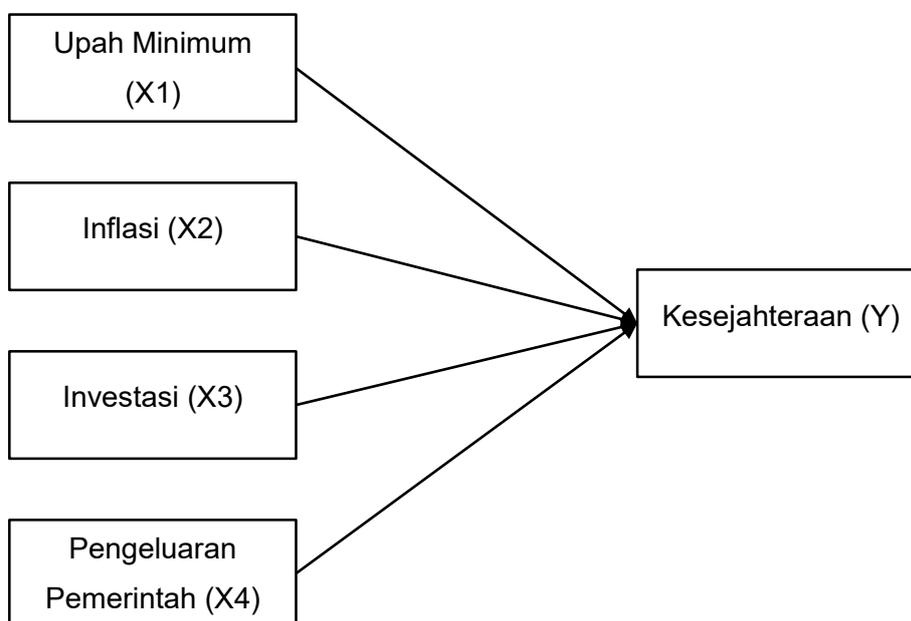
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dalam Penelitian Dampak Upah minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) Upah minimum, (2) Inflasi, (3) Investasi, dan (4) Pengeluaran Pemerintah. Variabel-variabel tersebut dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dalam pencapaian pembangunan ekonomi yang optimal diperlukan kebijakan ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang kemudian berdampak kepada pendapatan dan konsumsi masyarakat. Penerapan upah minimum dapat memberikan perlindungan atas hak upah yang diterima oleh tenaga kerja, namun dampak ekonomi dari intervensi tersebut tetap harus dipertimbangkan dalam lingkup ekonomi makro.

Selain itu dampak inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa dampak inflasi yang dapat meningkatkan harga barang-barang secara keseluruhan dengan jangka waktu yang lama sehingga pertimbangan dan pengendalian harus tetap dijaga melalui kebijakan yang berkelanjutan.

Dari paparan di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada Gambar 2.1 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga upah minimum berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan
3. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan